

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dalam Bayang-bayang Defisit APBD

Pembahasan APBD DKI 2020 dilakukan dalam bayang-bayang defisit dari target pemasukan dan waktu yang mepet. Banyak yang harus dibenahi, padahal anggaran harus disahkan paling lambat 30 November.

Irene Sarwindaningrum dan Nikolaus Harbowo

Pembenahan APBD DKI Jakarta 2020 harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan pemasukan daerah pada tahun ini yang masih kurang Rp 6,39 triliun.

Kondisi ekonomi yang lebih suram dari harapan mewarnai pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020. Seperti yang sudah diberitakan, defisit Rp 6,39 triliun itu berasal dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum tersalurkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Kondisi diperparah karena pemasukan pajak kurang dari target semula.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, akibat kondisi tersebut, silpa yang awalnya dipatok Rp 8 triliun, dalam pembahasan anggaran terpaksa Rp 3 triliun. "Sehingga cadangan dana untuk anggaran tahun depan berkurang," katanya dalam rapat di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Silpa adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus dan defisit anggaran dengan pembiayaan bersih (neto). Sementara, pemasukan pajak yang terkoreksi terbesar terdapat pada mata bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dari target pada Oktober Rp 7 triliun, saat ini BPRD DKI baru mencatat pemasukan Rp 3,5 triliun dari BPHTB. Pajak lain yang terkoreksi di antaranya dari sektor restoran dan parkir.

Selama sepekan lalu, Pemprov DKI pun melakukan pe-

nyisiran anggaran dengan maksud efisiensi sesuai dengan realisasi pemasukan tersebut. Hasil efisiensi sempat dibahas di Komisi D DPRD DKI Jakarta pada hari Senin. Namun, pembahasan itu langsung dihentikan karena Komisi D menilai perlu ada dasar hukum untuk perubahan angka dalam rancangan KUA-PPAS itu.

KUA-PPAS yang diajukan pada Juli lalu didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 61 Tahun 2019 tentang rancangan kerja perangkat daerah 2020. Besarnya anggaran sekitar Rp 95 triliun. "Perlu ada revisi aturan kalau rancangan KUA-PPAS yang diajukan direvisi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Senin.

Sementara, waktu pembahasan sudah mepet. Revisi aturan dan anggaran akan membuat waktu semakin panjang. Selama dua hari terakhir, pimpinan DPRD DKI Jakarta terlihat memimpin langsung rapat di komisi, sebuah kejadian yang langka.

Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah ikut rapat di Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Selasa ini. Kehadiran Sekretaris Daerah langsung di rapat komisi pun merupakan hal yang langka. Sebab, biasanya, pemimpin TAPD hadir dalam rapat badan anggaran yang merupakan rapat besar dari ra-

pat-rapat di tingkat komisi.

Terkait dihentikannya rapat di Komisi D, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI tak mengajukan rancangan KUA-PPAS baru. Rancangan yang diajukan masih sama, yaitu senilai Rp 95 triliun, sementara rancangan dengan nilai Rp 89,4 triliun hanya rencana kerja untuk mengantisipasi efisiensi. Karena itu, tak diperlukan peraturan gubernur revisi untuk itu.

"Itu tidak diajukan. Sekali lagi, itu hanya kertas kerja, catatan kolektif SKPD kira-kira berdasarkan kondisi ekonomi sekarang. Kan, kita mestiantisipasi. Jadi, karena dokumen tak ditarik, tak perlu surat gubernur baru," katanya.

Anggaran dipertanyakan

Di luar isu efisiensi, sejumlah mata anggaran justru mengundang tanya dari para anggota Dewan. Hal itu di antaranya pembangunan jalur sepeda yang naik dari Rp 4,4 miliar menjadi Rp 73 miliar, anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang juga naik, serta anggaran hibah untuk organisasi-organisasi masyarakat yang dinilai besarnya membebani keuangan daerah.

Pemprov DKI menyatakan, dengan anggaran sebesar itu, jalur sepeda akan terintegrasi dengan stasiun moda raya terpadu, stasiun komuter, dan halte bus Transjakarta, juga ada pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor bus Transjakarta.

"Program ini menjadi salah satu faktor kunci penyelesaian *first and last mile*-nya sistem angkutan umum massal saat ini. Makanya, kenapa stasiun,

halte, akan kami petakan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Sebagai catatan, DKI sedang mengerjakan proyek pembangunan jalur sepeda yang terbagi tiga fase dari tahun ini hingga lima tahun ke depan.

Di dalam Rapat Komisi B itu, anggaran pembangunan jalur sepeda belum bisa diketok karena masih menuai kritik. Manuara Siahaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, menilai, kebijakan tersebut semakin menambah kemacetan.

"Saya minta Dishub DKI memaparkan *grand design* pembangunan jalur sepeda. Kalau tidak mampu ditunjukkan, saya rekomendasikan dicoret saja," ucapnya.

Nur Afni Sajim, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikannya, payung hukum terkait keberadaan jalur sepeda dibutuhkan sebelum anggaran diketok. Hal ini demi keselamatan bagi pesepeda.